

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta Konsekuensi terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

Abdurohim

Program Studi Manajemen, Universitas Jenderal Achmad Yani, 40531, Indonesia
abdurrohim@mn.unjani.ac.id

Abstract

This study aims to provide a solution to the Regional Government in West Java whose regional revenue funds have decreased during the COVID-19 pandemic. This study uses a common size analysis to assess the impact on the use of regional loans, and uses a descriptive method, with the data analysis model used is multiple linear regression. The population of this study was 28 Regional Governments in West Java in 2015-2021 on the common size method while for hypothesis testing using the 2018-2021 period data. The results obtained on the effect of income, loans and local loan installments on regional expenditures when assessed partially, regional loans and installments have no significant effect as regional income on regional expenditures, but when assessed simultaneously that regional income, loans and local loan installments have an influence significant.

Keywords: regional revenue, regional loans and installments, regional financing.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang dana penerimaan daerahnya mengalami penurunan selama pandemi covid-19. Penelitian ini menggunakan common size analisis untuk melakukan penilaian atas dampak terhadap penggunaan pinjaman daerah, dan menggunakan metode deskriptif, dengan model analisis data yang digunakan yaitu regresi linear berganda. Populasi penelitian ini 28 Pemerintahan Daerah di Jawa barat pada tahun 2015-2021 pada metode common size sedangkan untuk pengujian hipotesis menggunakan data periode 2018-2021. Hasil yang didapatkan atas pengaruh pendapatan, pinjaman dan angsuran pinjaman daerah terhadap belanja daerah bila dinilai secara parsial maka pinjaman dan angsuran daerah pengaruhnya belum signifikan seperti pendapatan daerah terhadap belanja daerah, namun bila dinilai secara simultan bahwa pendapatan daerah, pinjaman dan angsuran pinjaman daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Kata kunci: penerimaan daerah, pinjaman serta angsuran daerah, pembiayaan daerah.

I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kebutuhan dana untuk membiayai aktivitas Pemerintah Daerah maupun yang dipergunakan untuk membangun infrastruktur terus meningkat, disisi lain penerimaan daerah tidak bisa diprediksi peningkatannya mengingat banyak kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan penerimaan daerah, seperti pandemi covid-19, menyebabkan banyak usaha yang tutup ataupun tetap menjalankan bisnis hanya sekedar untuk bertahan supaya tidak mengalami kendala jika kondisi lingkungan bisnis normal kembali. Beberapa Pemerintah Daerah di Jawa Barat, upaya menanggulangi defisit anggaran, maka beberapa Pemerintah Daerah di Pemerintahan Daerah Jawa Barat melakukan upaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berimbang, salah satunya menetapkan kebijakan peminjaman dana kepada pihak ketiga. Peminjaman dana tersebut tidak dilarang dan didasarkan pada Undang-Undang. Pemenuhan kebutuhan dana guna menjaga kelangsungan pembangunan dipenuhi dari pinjaman (Kemenkeu RI, 2020).

Namun jika peminjaman dana tersebut tidak dilakukan secara hati hati akan berdampak pada penurunan kualitas belanja daerah pada tahun selanjutnya, sebab dana yang tersedia untuk belanja dan pembiayaan kebutuhan Pemerintah Daerah langsung dialokasikan untuk mengangsur pokok dan bunga kepada pihak ketiga. Sehingga prioritas pembangunan pada sektor lain tidak bisa dilakukan, hal ini mengingat Pemerintah Daerah kehadirannya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang berimbang. Keseimbangan anggaran Pemerintah Daerah merupakan prioritas utama guna tidak membebani perencanaan selanjutnya (Yuliasati K, 2017).

Tabel 1. Perkembangan Pinjaman Daerah di Jawa Barat
(dalam jutaan rupiah)

	2015	2016	2017	2018
Pinjaman	-	10.442	61.450	128.615
Pengeluaran Daerah	95.342.229	107.328.807	116.797.111	119.963.280
Persentase (%)	0,00%	0,01%	0,05%	0,11%
Pendapatan Daerah	96.778.847	104.646.951	117.434.191	120.481.500
Persentase (%)	0,00%	0,01%	0,05%	0,11%

	2019	2020	2021
Pinjaman	813.323	1.925.943	2.578.462
Pengeluaran Daerah	129.716.564	128.048.147	136.161.518
Persentase (%)	0,63%	1,50%	1,89%
Pendapatan Daerah	131.242.239	124.296.089	128.149.575
Persentase (%)	0,62%	1,55%	2,01%

Sumber Data: Dirjen Perimbangan Daerah, Diolah Penulis (2022).

Ratio Pinjaman Daerah pada tahun 2015 baru mencapai 0,00% namun pada tahun 2021 mengalami peningkatan atau sudah mencapai 1,89% sedangkan ditinjau dari peranan pinjaman daerah terhadap penerimaan daerah juga mengalami peningkatan menunjukkan kebutuhan dana yang diperlukan pada tahun 2015 baru 0,00% sedangkan pada tahun 2021 perannya sudah mencapai 2,01%, artinya bahwa pinjaman daerah sangat penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Kebutuhan pinjaman daerah untuk merealisasikan pembangunan sangat penting karena Pemerintah Daerah tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dana yang berasal dari Pemerintah Pusat (Nurul, 2020).

Demikian pula halnya dengan konsuekensi terhadap kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman daerah mempengaruhi terhadap kualitas perencanaan belanja daerah pada tahun berikutnya, sehingga banyak rencana belanja daerah yang tidak dilakukan mengingat dana yang berasal dari pendapatan daerah tersebut diprioritaskan untuk melunasi kewajiban hutang pokok dan bunga Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain di dalam negeri, dan dilarang memperoleh pendanaan dari luar negeri langsung (Kemenkeu RI, 2011). Perekembangan pembayaran pinjaman daerah (angsuran pokok dan bunga) di Jawa Barat dari tahun 2015-2021.

Tabel 2. Angsuran Pinjaman Daerah pada seluruh Pemerintah Daerah Jawa Barat
(dalam jutaan rupiah)

	2015	2016	2017	2018
Pembayaran	21.339	102.013	221.863	145.041
Pengeluaran Daerah	95.342.229	107.328.807	116.797.111	119.963.280
Persentase (%)	0,02%	0,10%	0,19%	0,12%
Pendapatan Daerah	96.778.847	104.646.951	117.434.191	120.481.500
Persentase (%)	0,02%	0,10%	0,19%	0,12%

	2019	2020	2021
Pembayaran	872.935	721.689	97.992
Pengeluaran Daerah	129.716.564	128.048.147	136.161.518
Persentase (%)	0,67%	0,56%	0,07%
Pendapatan Daerah	131.242.239	124.296.089	128.149.575
Persentase (%)	0,67%	0,58%	0,08%

Sumber Data: Dirjen Perimbangan Daerah, Diolah Penulis (2022).

Pinjaman daerah oleh Pemerintah Daerah di Jawa Barat memberikan konsuekensi mengurangi belanja daerah sebesar 0,02% periode anggaran 2015 dan mengalami peningkatan pada periode anggaran 2019 sekitar 0,67%, sedangkan pada tahun 2021 komposisinya menjadi hanya 0,07%.

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

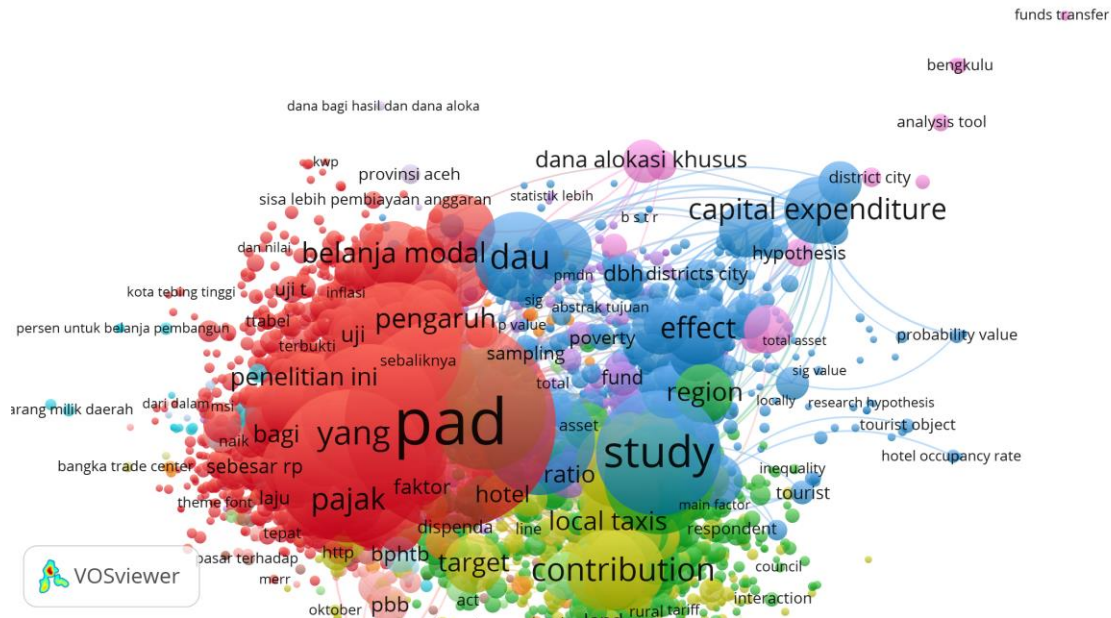
Ditinjau dari Pendapatan Daerah maka berpengaruh terhadap peningkatan alokasi dana yang dipergunakan untuk membayar pokok dan bunga periode 2016 sebanyak 0,67% dan berbeda periode 2021 mengalami penurunan mencapai 0,08%. Penggunaan dana pinjaman bila tidak dilakukan hati-hati berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya pada masa yang akan datang (al-Rubaie & Ahmed, 2021).

Pinjaman daerah merupakan kebijakan alternatif yang dilakukan dipergunakan untuk menjaga keseimbangan pengeluaran rutin dan pembangunan Daerah, sehingga tidak terjadi defisit yang berdampak pada tidak terbayarkannya atas kewajiban kepada pihak ketiga seperti kontraktor bahkan kesejahteraan pegawai juga bisa dikurangi seperti tunjangan kinerja, sehingga mempengaruhi reputasi Pemerintah Daerah terhadap publik. Penggunaan pinjaman secara efektif serta efisien mencerminkan tata kelola penggunaan anggaran yang baik (Cao et al., 2019).

Pembiayaan daerah untuk mendukung operasi Pemerintah Daerah seluruh Jawa Barat mengalami defisit pada tahun 2016 sebesar Rp 2.681 juta, tahun 2020 sebesar 3,752 juta serta pada tahun 2021 Rp 8.011 juta, hal ini disebabkan dampak dari pandemi covid-19 menyebabkan penerimaan daerah mengalami penurunan sehingga menyebabkan terjadinya anggaran defisit. Beberapa daerah melakukan peminjaman dana untuk menjaga keseimbangan penerimaan dan belanja kepada pihak ketiga. Pembangunan di daerah terus meningkat, harus diimbangi dengan kemudahan memperoleh sumber dana (Baskaran et al., 2016).

Kebaharuan dalam meneliti permasalahan yang terjadi, bila diperbandingkan dengan yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, adalah membahas penggunaan pinjaman daerah serta angsuran pinjaman daerah yang efektif dan efisien baik saat ini maupun pada tahun mendatang, sehingga tidak mengganggu penyusunan belanja daerah selanjutnya, mengingat pinjaman yang diterima tersebut oleh Pemerintah Daerah, memiliki kewajiban untuk mengangsur pokok dan bunga pinjaman daerah yang tidak sedikit, sehingga berdampak terhadap kemampuan dalam perencanaan pembangunan pada tahun berikutnya, serta apabila penerimaan daerah juga mengalami penurunan sesuai dengan perkembangan lingkungan yang masih menghadapi berbagai permasalahan seperti belum pulihnya pandemi covid-10 serta perang Rusia dengan Ukraina yang saat ini sedang berlangsung. Kebaharuan penelitian sangat diperlukan, perlu membandingkan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang bervariasi dan juga keberhasilan peneliti menemukan orsinalitas penelitian (Alajami, 2020). Pencarian penelitian terdahulu yang telah disajikan oleh beberapa penulis di Indonesia maupun di luar negeri dilakukan melalui Google Scholar, Crossef, Semantic Scholar serta Scopus menggunakan *Publish or Perish* (PoP) yang kemudian dianalisa melalui *VOSviewer* dengan rincian data items 3.219, cluster 15, Links 53.494, total links 2.578.512, sehingga memperoleh perbandingan yang signifikan untuk dipergunakan sebagai penelitian berkelanjutan.

Hasil pencarian data dari penelitian terdahulu, belum ditemukan adanya penelitian yang membahas penggunaan pinjaman daerah yang efektif, sehingga dapat menjamin perencanaan penggunaan dana untuk kegiatan operasional dan pembangunan, kebanyakan penelitian terdahulu masih terfokus pada analisa pengaruh hubungan antara pinjaman, penerimaan terhadap belanja daerah. Adapun hasil pencarian data penelitian terdahulu sebagai berikut:



Gambar 1. Data Penelitian Pinjaman Daerah dan Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah

Sumber: Google Scholar, Crossref, Scopus diolah Peneliti (PoP, VOSviewer, 2022)

Rumusan Masalah

Pada penelitian ini telah dirumuskan permasalahan, yaitu:

1. Seberapa besar pinjaman daerah serta pembayaran pokok dan bunga pinjaman berdampak pada alokasi penerimaan daerah serta mengurangi perencanaan belanja daerah di masa yang akan datang?
2. Apakah ada pengaruh pinjaman daerah, penerimaan serta angsuran kewajiban daerah terhadap Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah?

Tujuan Penelitian

Memberikan solusi terhadap Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang dana penerimaan daerahnya mengalami penurunan selama pandemi covid-19, namun menginginkan keberlanjutan melaksanakan pembangunan, melalui pendanaan dari pihak ketiga, serta peningkatan penerimaan dana, sehingga mampu di masa yang akan datang mempertahankan menyelenggarakan layanan yang berkualitas terhadap masyarakat, serta sebagai sumbangan pemikiran ilmiah guna melaksanakan tugas-tugas yang menjadi kewajiban Kampus terhadap kehidupan penelitian yang lebih semarak.

Harapan dari penulis adalah akan ada yang melakukan penelitian lanjutan guna mengembangkan materi yang berkaitan dengan pinjaman daerah, penerimaan daerah serta perencanaan Daerah.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pendapatan Daerah

Penerimaan yang berasal dari masyarakat di daerah merupakan hak sepenuhnya pemerintah yang bersangkutan dan dijamin oleh Pemerintah Pusat, guna meningkatkan mampu melaksanakan aktivitas pemerintahan secara mandiri, dan tidak boleh terus menerus bergantung pada dana yang berasal dari pihak manapun. Hasil yang diperoleh diharapkan menjadi solusi untuk pembiayaan yang dilaksanakan di daerah (Afrizal & Maulida, 2011). Pendapatan daerah Provinsi, Kabupaten dan kota tersebut meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Diperbolehkan oleh Undang-Undang untuk melakukan pemungutan pada masyarakat yang berkegiatan di daerah memperoleh kenikmatan sehingga mampu meningkatkan kemampuannya baik untuk perolehan kekayaan maupun dipergunakan untuk keperluan sehari-hari. Penerimaan pendapatan ini merupakan kegiatan legal mengingat Pemerintah Pusat telah memberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan. Penerimaan pendapatan asli daerah yang meningkat memberikan dampak kemampuan yang berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah (Mahdavi & Westerlund, 2018).

Penghasilan yang berasal dari daerahnya sendiri merupakan cerminan atas keberhasilan dalam mengembangkan daerahnya, dengan tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat luas, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung ke daerah tersebut sebagai pelancong melihat keindahan alam, kuliner, serta aktivitas lain terus berubah, diharapkan mampu mendatangkan hasil, sebab perolehan tersebut diharapkan mampu berkontribusi semakin meningkat sehingga kemandirian daerah untuk membiayai dirinya sendiri dapat dilaksanakan. Pendapatan Asli Daerah dipergunakan sebagai sumber pembiayaan utama (Nasir, 2019).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Pemerintahan Daerah Jawa Barat secara kuantitatif mengalami peningkatan meskipun terjadi pandemi covid-19, sehingga berpengaruh terhadap ratio yang diperbandingkan dengan pengeluaran belanja daerah, secara kualitatif rasionya mengalami fluktuatif, kadang meningkat juga mengalami penurunan bila diperbandingkan dengan tahun sebelumnya. Setiap penurunan dan peningkatan penerimaan berpengaruh besar terhadap implementasi pembangunan di daerah (Aji et al., 2015).

Cerminan keberhasilan mengembangkan daerahnya, dengan tersedianya berbagai infrastruktur yang memadai untuk dipergunakan oleh masyarakat luas, sehingga minat masyarakat untuk berkunjung ke daerah tersebut sebagai pelancong melihat keindahan alam, kuliner, serta aktivitas lain terus bertambah, mampu mendatangkan penerimaan, sebab perolehan yang didapat tersebut diharapkan mampu berkontribusi semakin meningkat sehingga kemandirian daerah untuk membiayai dirinya sendiri dapat dilaksanakan. Penghasilan yang diukumpulkan dipergunakan sebagai sumber pembiayaan utama (Nasir, 2019). Pendapatan Asli Daerah (PAD) meliputi:

a. Pajak Daerah

Sumbangan diberikan oleh wajib pajak karena beraktivitas maupun berusaha ataupun bertempat tinggal di daerah tersebut baik pribadi maupun perusahaan diatur secara formal sehingga tidak ada kekhawatiran adanya penyalahgunaan dalam pemungutan fiskal. Pajak diterima secara resmi oleh satuan pengelola pajak, berfungsi *budgeter* yang memiliki makna bahwa dana yang dipungut dari wajib pajak dipergunakan. Pemungutan pajak yang sukses dilandasi oleh kemauan pengelola pajak di daerah (Sipos, 2015).

b. *Retribute* Daerah

Kewajiban pengusaha membayar secara resmi atas pemberian jasa atau izin tertentu bagi perorangan maupun badan usaha yang beroperasi di daerah tersebut sesuai pengaturan berlaku. Aktivitas pengumpulan secara transparan, dapat dipertanggungjawabkan, memberikan jalan terbuka lebar untuk meningkatkan penerimaan selain pajak. Retribusi daerah memiliki pengaruh dalam pembiayaan daerah namun belum optimal karena Pemerintah Daerah belum fokus dalam penanganan penerimaan pendapatan dari retribusi daerah (Sudarmana & Sudiartha, 2020).

c. Penghasilan lain dari aset yang dimiliki serta dimanfaatkan untuk memperoleh penghasilan, sehingga memberikan sumbangan tidak sedikit guna mendukung pembangunan yang dilaksanakan oleh penguasa di daerah. *Trend* perolehan penghasilan lainnya semakin meningkat setiap tahun menunjang kesiapan kemandirian daerah (Sari & Mustanda, 2019).

2. Pendapatan Transfer dari Pusat (dana perimbangan)

Masih menjadi sumber pendanaan belanja daerah, mengingat banyak Pemerintah Daerah belum optimal mengelola dan mengarahkan terjadinya efek multiplier (Yaqin & Herwanti, 2018). Adapun dana tersebut meliputi:

a. Dana Alokasi Umum (DAU) berasal dari Pemerintah Pusat dipergunakan sebagai pembiayaan mendukung aktivitas operasional pemerintah lokal.

- b. Dana Alokasi Khusus (DAK) keperluan pembiayaan urusan daerah disesuaikan dengan program yang dirancang mempercepat perekonomian yang tumbuh secara merata.
- c. Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan hasil yang diperoleh berdasarkan presentase tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Berasal dari pertambangan, perikanan, pertanian di daerah tersebut.

Namun banyak pemerintahan lokal mampu membiayai dirinya dengan mengandalkan penerimaan daerah dari Pajak Daerah serta penghasilan lain seperti Pemerintah Daerah memiliki Badan Usaha Daerah yang sehat Seperti Pemerintah lainnya memiliki Bank Daerah yang maju dan modern telah memberikan pendapatan ke Pemerintah Daerah yang tidak sedikit.

3. Pinjaman Daerah

Merupakan alternatif pemenuhan atas anggaran daerah yang mengalami keurangan atau minus, akibat pembaiayaan rutin maupun untuk dipergunakan pembangunan infrastruktur melebihi penghasilan yang diperolehnya, sehingga bila tidak segera ditanggulangi maka terjadi defisit anggaran. Defisit ini masih bisa ditolerir bila masih dibawah dari prosentase yang ditetapkan, sehingga jalan satu satunya yaitu dengan melakukan pinjaman kepada pihak ketiga.

Untuk memperoleh pinjaman dari pihak ketiga tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kewajiban Pemeritah Daerah atas pinjaman tersebut, wajib mengalokasikan dana yang berasal dari pendapatan daerah untuk mengangsur pokok maupun bunganya. Dalam realisasinya pinjaman daerah ini bisa dilakukan dengan pihak dalam negeri maupun dari luar negeri sepanjang memenuhi persyaratan. Perolehan dana dari pihak lain yang tidak terukur berdampak pada kesulitan pemenuhan kewajiban dan pengelolaan keuangan selanjutnya (Chen et al., 2020).

4. Belanja Daerah

Penggunaan dana ini memiliki konsuekensi terhadap pengurangan likuiditas atas kemampuan pengelolaan anggaran. Untuk penggunaanya bisa diperuntukan untuk pembelian aset seperti inventaris, pembangunan gedung, serta pengeluaran yang untuk mengadakan jasa seperti pembiayaan *workshop*, seminar maupun perjalanan dinas para pejabat daerah.

Namun jika pengeluaran dana daerah untuk pembangunan yang langsung menghasilkan seperti pasar, terminal, pelabuhan, bandara yang akan memberikan hasil berupa retribusi, sehingga akan berdampak pada penerimaan kembali. Pengeluaran Pemerintah Daerah berdampak pada peningkatan *output* yang dihasilkan oleh masyarakat (Räsänen & Mäkelä, 2021).

5. *Common Size Analysis*

Merupakan teknik yang digunakan pihak yang berkepentingan dalam menganalisa atas presentasi investasi pada item aktiva terhadap jumlah yang dimiliki *Asset* perusahaan maupun untuk menilai jumlah biaya atau beban yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan/entitas dengan jumlah pendapatan atau penerimaan perusahaan, sehingga dapat dilakukan penilaian atas peranan masing-masing *account* dalam mempengaruhi komposisinya, sehingga dapat diukur distribusi terhadap kelompoknya. Analisa *Common Size* memberikan gambaran atas perubahan komponen akun mengalami kenaikan atau penurunan dengan membandingkan data lebih dari satu tahun (Pratiwi & Hidayati, 2018).

III. METODE PENELITIAN

Penggunaan teknik penelitian oleh peneliti:

1. *Common Size Analysis* dipergunakan melakukan penilaian atas dampak terhadap penggunaan pinjaman daerah berupa angsuran pokok dan bunga yang akan mengurangi alokasi belanja daerah serta membebani Pendapatan Daerah, dengan cara membandingkan item Penerimaan Daerah, Belanja Daerah dibandingkan dengan pinjaman daerah, serta angsuran pinjaman.
2. Metoda Deskriptif Statistik untuk melakukan penilaian atas pengaruh pinjaman daerah, angsuran pinjaman, pendapatan daerah terhadap belanja daerah.
3. Regresi *Linear* berganda
Dipergunakan untuk menilai pengaruh variabel independen lebih banyak dari satu diperkirakan mampu mempengaruhi variabel tetap (*dependent*).

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Y = Dependent
a = Konstanta
b₁, b₂ = Koefisien regresi
X₁, X₂ = Independent

Populasi data dibatasi mulai tahun 2015 sampai dengan 2021 untuk melakukan analisa pada metode *Common Size Analysis*, dengan membandingkan antara satu item dengan jumlah beberapa item baik pada neraca maupun laba rugi. Melalui analisa perbandingan secara vertikal ini guna mendeteksi pengalokasian penggunaan dana sehingga bisa dilakukan interpretasi (Farida et al., 2019).

Sedangkan untuk menganalisis pengaruh Pendapatan Daerah, Pinjaman Daerah, Angsuran Pinjaman Daerah, terhadap Belanja Daerah dengan mengambil sampel Anggaran Pendapatan Belanja Daerah pada periode 2018 sampai 2021, pada 28 Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Penelitian kuantitatif sangat tepat bila dipergunakan pada permasalahan yang saling mempengaruhi, dan peneliti bermaksud mendalami permasalahan yang akan terjadi (Sugiyono, 2013).

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

Serta penggunaan analisa Statistik Deskriptif untuk mendeskripsikan, meringkas dan membuat *summary* data sehingga dapat dipergunakan pada distribusi pola data. Penggunaan teknik penelitian disesuaikan dengan kemampuan peneliti (Maswar, 2017).

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Common Size Pinjaman Daerah, Angsuran Pinjaman Daerah terhadap Penerimaan Daerah serta Belanja Daerah.

Analisa *Common Size* digunakan untuk menilai data keuangan perusahaan dengan membandingkan data keuangan secara vertikal, yaitu dengan membandingkan peranan masing-masing dalam satu tahun dibandingkan dengan tahun yang lainnya. Setiap akun dalam laporan tersebut akan dibandingkan dengan total atas seluruh aktivitas. Kemampuan perusahaan atau Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan penggunaan dana komersial pihak lain mampu memanfaatkannya serta tidak menimbulkan preseden di kemudian hari (Corporate Finance Intitute, 2022), sehingga dapat diketahui perubahan yang terjadi atas kemampuan pengelolaan perusahaan sehingga menjamin kesetabilan operasi serta kebijakan yang telah ditetapkan adalah efektif serta efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan baik pada tahun berikutnya. Di bawah ini disajikan *Common Size Analysis* atas data Pemerintah Daerah di Jawa Barat.

Tabel 3. Common Size Pemerintah Daerah di Jawa barat

NO	PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA	PINJAMAN	ANGSURAN
1	Prov Jawa Barat	28,87%	28,40%	68,00%	
2	Kab Bandung	4,08%	4,22%		0,12%
3	Kab Bekasi	4,50%	4,41%		0,16%
4	Kab Bogor	6,01%	6,02%		
5	Kab Ciamis	2,06%	2,12%	2,54%	11,47%
6	Kab Cianjur	2,91%	2,99%	4,00%	10,51%
7	Kab Cirebon	2,97%	2,99%	0,75%	2,00%
8	Kab Garut	3,46%	3,54%	0,18%	1,98%
9	Kab Indramayu	2,74%	2,78%		
10	Kab Karawang	3,41%	3,38%		
11	Kab Kuningan	2,11%	2,16%	0,27%	5,72%
12	Kab Majalengka	2,43%	2,43%	0,35%	0,92%
13	Kab Purwakarta	1,72%	1,73%		10,22%
14	Kab Subang	2,33%	2,38%	0,57%	1,80%
15	Kab Sukabumi	3,10%	3,14%		
16	Kab Sumedang	2,17%	2,19%	3,57%	11,72%
17	Kab Tasikmalaya	2,75%	2,85%	0,79%	2,08%
18	Kota Bandung	5,07%	4,92%		1,32%
19	Kota Bekasi	4,28%	4,17%		0,61%
20	Kota Bogor	1,96%	1,93%	4,13%	11,74%
21	Kota Cirebon	1,24%	1,23%	3,47%	10,34%

NO	PEMERINTAHAN DAERAH	PENDAPATAN	BELANJA	PINJAMAN	ANGSURAN
22	Kota Depok	2,46%	2,44%		
23	Kota Sukabumi	1,00%	1,00%		0,26%
24	Kota Tasikmalaya	1,44%	1,49%	2,54%	6,88%
25	Kota Cimahi	1,11%	1,15%	1,04%	1,82%
26	Kota Banjar	0,64%	0,67%	0,79%	2,08%
27	Kab Bandung Barat	2,12%	2,21%	5,18%	1,51%
28	Kab Pangandaran	1,07%	1,08%	1,82%	4,76%
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%

Sumber: Dirjen Anggaran KemenKeu RI (Diolah Peneliti, 2022)

Analisa penggunaan pinjaman dan angsuran daerah:

- a. Pinjaman daerah seluruh Pemerintah Daerah di Jawa Barat selama periode 2015 sampai dengan 2021 bila dibandingkan dengan pendapatan daerah telah mencapai 15,28%, sedangkan bila diperbandingkan dengan belanja daerah sebesar 13,50%. Peranan pinjaman daerah terhadap pendapatan dan belanja daerah semakin besar, sehingga menunjukkan bahwa efektivitas dalam mengelola penerimaan daerah belum optimal, banyak potensi penerimaan daerah yang belum tergarap optimal misalnya pajak hotel, restoran dan hiburan, pajak penerangan jalan masih banyak Kabupaten/Kota yang belum dilakukan secara digital masih mengandalkan terhadap perhitungan manual. Sedangkan untuk Provinsi dalam pemungutan pajak bahan bakar minyak juga masih dilakukan secara manual. Sedangkan angsuran pinjaman daerah telah mencapai 15,84% bila diperbandingkan dengan pendapatan serta bila diperbandingkan dengan belanja daerah sebesar 14,01%. Hal ini menunjukkan efisiensi Pemerintah Daerah dalam menggunakan belanja daerah untuk keperluan bukan dipergunakan pembangunan infrastruktur serta potensi untuk terus menerus meningkatkan pendapatan daerah semakin membebani kinerja satuan pengelolaan penerimaan daerah semakin besar, apalagi dalam penerimaan daerah, hanya mengandalkan kegiatan Intensifikasi tidak diimbangi dengan ekstensifikasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
- b. Hasil *Common Size Analysis* Pinjaman dan Angsuran Daerah dengan membatasi Pemerintah Daerah yang memiliki rasio diatas 1,5%.. kewajiban membayar hutang diperhitungkan dari sumber pendapatan, sehingga berpengaruh pada kemampuan membayar kembali terhadap liquiditas yang dimiliki keatas maka diperoleh hasil:
 - 1) Pinjaman daerah diperbandingkan dengan Pendapatan Daerah
 - 2) Pinjaman daerah diperbandingkan dengan belanja daerah

- 3) Angsuran pinjaman daerah diperbandingkan dengan pendapatan daerah
- 4) Angsuran pinjaman daerah diperbandingkan dengan belanja daerah

Hasil Uji Asumsi Klasik

Data yang diuji periode 2018 sampai dengan 2021 berasal dari Direktur Jendral Perimbangan Daerah. Hasil uji statistik menggunakan SPSS 25 memberikan kemudahan bagi peneliti menghasilkan penelitian yang akurat memenuhi persyaratan ilmiah yang ditetapkan (Imam Ghozali, 2006).

Penggunaan uji asumsi klasik dengan menggunakan SPSS 25 sangat membantu peneliti dalam menginterpretasikan data secara time series, dengan sampling banyak, merupakan hal yang sangat rumit dan semua hasil yang diuji harus memenuhi syarat dengan hasil sebagai berikut:

Uji Statistik Deskriptif

Tabel 4. Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pendapatan Daerah	112	717	41471	4691.93	6404.070
Pinjaman Daerah	112	0	2212	48.62	254.301
Angsuran Pinjaman	112	0	159	15.77	33.661
Belanja Daerah	112	792	44615	4281.92	5892.811
Valid N (listwise)	112				

Tabel 4 hasil pengolahan data yang terdiri dari Pinjaman dan Angsuran Daerah, Pendapatan Daerah, Belanja Daerah periode 2018-2021 dengan jumlah sampel 112, pada sampel yang tersedia 129 (Provinsi, Kabupaten, Kota) di Jawa Barat. Pendapatan daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 4.691,93 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 6.404,070 milyar, Pendapatan daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 4.691,93 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 6.404,070 milyar, Pendapatan daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 4.691,93 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 6.404,070 milyar, Pendapatan daerah menunjukkan nilai rata-rata sebesar Rp 4.691,93 milyar dengan standar deviasi sebesar Rp 6.404,070 milyar.

Uji Normalitas

Mengetahui data yang diuji harus berdistribusi normal. maka menghasilkan Monte Carlo Sig (2-tailed) masing masing pendapatan daerah sebesar 0,314 dan pinjaman daerah sebesar 0,775 dan belanja daerah sebesar 0,411 serta angsuran pinjaman sebesar 0,067 > a (0.05). hasilnya data yang dipergunakan dalam penelitian memenuhi syarat distribusi normal.

Tabel 5. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Pend Daerah	Pinj Daerah	Blinj Daerah	Angs Pinj	
N		112	35	112	49	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	8.1275	3.6197	8.0577	2.4480	
	Std. Deviation	.68434	1.46136	.66849	1.98684	
Most Extreme Differences	Absolute	.089	.107	.083	.184	
	Positive	.089	.107	.083	.094	
	Negative	-.067	-.069	-.080	-.184	
Test Statistic		.089	.107	.083	.184	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.028 ^c	.200 ^{c,e}	.058 ^c	.000 ^c	
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.314 ^d	.775 ^d	.411 ^d	.067 ^d	
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.302	.764	.398	.061
		Upper Bound	.326	.786	.423	.074

Uji Multikolinieritas

Untuk menguji atas data yang dipergunakan dalam penelitian terjadi korelasi pada variabel bebas pada model regresi. Sebab model regresi yang baik jika terjadi Multikolinieritas menunjukkan adanya hubungan linear yang sempurna antara variabel atau semua variabel. Pada penelitian ini apakah terdapat Multikolinieritas dengan membandingkan antara nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Pada tabel 6 diperoleh bahwa nilai VIF <10,00 dan nilai *tolerance* > 0.100.

Karena itu pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti memberikan gambaran bahwa varibel independent yang digunakan dalam model regresi Toleransinya memiliki nilai masing-masing pendapatan daerah 0,503 dan pinjaman daerah sebesar 0,511 serta angsuran pinjaman daerah 0,944 berada diatas nilai 0,100 sedangkan. Untuk VIF nya masing-masing diperoleh pendapatan daerah sebesar 1,989 dan pinjaman daerah sebesar 1,957 serta angsuran pinjaman daerah sebesar 1,059 di bawah 10,00. Pengujian yang telah dilakukan memenuhi persyaratan yaitu tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

Tabel 6. Uji Multikolinieritas

Model		Coefficients ^a						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	179.507	394.170		.455	.650		
	Pendapatan Daerah	.905	.059	.984	15.318	.000	.503	1.989
	Pinjaman Daerah	-3.684	1.476	-.159	-2.495	.014	.511	1.957
	Angsuran Pinjaman	2.116	8.205	.012	.258	.797	.944	1.059

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Uji Heteroskedastitas

Menggunakan uji Glejser, bila Sig <0,05 tidak ada gejala heteroskedastitas. Adapun nilai dasar uji heteroskedastitas bila nilai Sig > 0,05. Sebaliknya jika Sig < 0,05 terjadi gejala heteroskedastitas. Pada tabel 7 Sig, yang diperoleh diatas 0,05 maka dapat dikatakan tidak terjadi gejala heteroskedastitas.

Tabel 7. Uji Heteroskedastitas

Model		Coefficients				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.300	.043		7.020	.000
	Pendapatan Daerah	1.114E-5	.000	.219	1.736	.085
	Pinjaman Daerah	.000	.000	.163	1.302	.196
	Angsuran Pinjaman	-.001	.001	-.100	-	.281
					1.085	

a. Dependent Variable: abs_res2

Uji Autokorelasi

Untuk mengetahui korelasi variabel pada model regresi linear, karena penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan berurutan waktu. Pengujian yang telah dilakukan penulis melalui penilaian Durbin Watson (DW) yaitu $1,7372 < 1,977 < 2,2528$ berarti pengujian memenuhi syarat yaitu tidak ada gejala autokorelasi.

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. The error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.881 ^a	.776	.770	2827.580	1.977

a. Predictors: (Constant), Angsuran Pinjaman, Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah

b. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil Pengujian Hipotesis

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Dari hasil pengujian data yang telah dihasilkan, maka untuk selanjutnya peneliti bisa menyusun

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + \dots + b_nX_n$$

Tabel 9. Untuk persamaan regresi linear berganda

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	179.507	394.170		.455	.650		
Pendapatan Daerah	.905	.059	.984	15.318	.000	.503	1.989
Pinjaman Daerah	-3.684	1.476	-.159	-2.495	.014	.511	1.957
Angsuran Pinjaman	2.116	8.205	.012	.258	.797	.944	1.059

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

$$Y = 179,507 + 0,905X_1 + (-3,684X_2) + 2.116X_3$$

Disimpulkan bahwa melalui *constant*a sebesar 179.507 maka setiap kenaikan/penurunan Rp.1,00 atas 0,905 pendapatan daerah, -3,684 pnurunan pinjaman, 2,116 angsuran pinjaman daerah berdampak pada perencanaan belanja daerah. Dan ini juga selaras dengan hasil yang dilakukan oleh peneliti melallui metode *Common Size Analysis* bahwa pinjaman daerah dan angsuran pinjaman daerah akan berdampak pada kemampuan perencanaan belanja daerah baik saat ini maupun dimasa yang akan datang bilamana tidak dilakukan secara efisien dan efektif.

2. Uji Hipotesis secara masing-masing

Pendapatan tidak bisa diprediksi perolehannya sehingga banyak Pemerintah Daerah di Jawa Barat yang melakukan Pinjaman Daerah untuk menjaga keseimbangan anggaran belanjanya, namun peminjaman tersebut juga berdampak pada angsuran pinjaman yang wajib dikembalikan. Pada hasil pengolahan data tersebut dapat diinterpretasikan.

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

Tabel 10. Uji t-(Parsial)

Model	Coefficients ^a						
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	179.507	394.170		.455	.650		
1 Pendapatan Daerah	.905	.059	.984	15.318	.000	.503	1.989
Pinjaman Daerah	-3.684	1.476	-.159	-2.495	.014	.511	1.957
Angsuran Pinjaman	2.116	8.205	.012	.258	.797	.944	1.059

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

Hasil yang diperoleh bahwa secara Parsial (masing-masing) sesuai Tabel 10 ditunjukkan pada uji t-hitung mendapatkan Sig. sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah memiliki nilai sig. $0,00 < a (0,05)$ menunjukkan bahwa belanja daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan lainnya yang sah) masih berpengaruh besar terhadap Belanja Daerah.

Hasil ini sesuai dengan penelitian (Nurul, 2020) bahwa pinjaman daerah sangat penting dalam menunjang pembiayaan pembangunan pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Kebutuhan pinjaman daerah untuk merealisasikan pembangunan sangat penting karena Pemerintah Daerah tidak bisa mengandalkan sepenuhnya dana yang berasal dari Pemerintah Pusat.

- b. Pinjaman Daerah memiliki nilai Sig $0,014 < a (0,05)$ serta Angsuran Pinjaman Daerah memiliki nilai Sig $0,797 < a (0,05)$ berarti kedua variabel tersebut tidak pengaruh besar terhadap Belanja Daerah pada Pemerintah Daerah di Jawa Barat. Hal ini meningat pinjaman daerah hanya dipergunakan untuk menutup anggaran defisit.

Konsuekensi terhadap kewajiban untuk membayar pokok dan bunga pinjaman daerah mempengaruhi terhadap kualitas perencanaan belanja daerah pada tahun berikutnya, sehingga banyak rencana belanja daerah yang tidak dilakukan mengingat dana yang berasal dari pendapatan daerah tersebut diprioritaskan untuk melunasi kewajiban hutang pokok dan bunga Pemerintah Daerah.

Pemerintah Daerah diperbolehkan untuk memperoleh pendanaan dari pihak lain di dalam negeri, dan dilarang memperoleh pendanaan dari luar negeri langsung (Kemenkeu RI, 2011). Pinjaman daerah merupakan kebijakan alternatif yang dilakukan dipergunakan untuk menjaga keseimbangan pengeluaran rutin dan pembangunan Daerah.

Sehingga tidak terjadi defisit yang berdampak pada tidak terbayarkannya atas kewajiban kepada pihak ketiga seperti kontraktor bahkan kesejahteraan pegawai juga bisa dikurangi seperti tunjangan kinerja, sehingga mempengaruhi reputasi Pemerintah Daerah terhadap publik. Penggunaan pinjaman secara efektif serta efisien mencerminkan tata kelola penggunaan anggaran yang baik (Cao et al., 2019).

Uji Hipotesis secara Simultan

Hasil uji data untuk mengetahui pengaruh atas pendapatan daerah, pinjaman daerah serta angsuran daerah (Uji F-hitung) diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Pendapatan dan Pinjaman daerah serta angsuran pinjaman daerah (pokok dan bunga) memiliki nilai $\text{sig. } 0,00 < \alpha (0,05)$ menunjukkan bahwa serta simultan belanja daerah (Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pendapatan lainnya yang sah), pinjaman daerah serta angsuran pinjaman daerah berpengaruh terhadap perencanaan Belanja Daerah.
2. Pinjaman daerah dan Angsuran daerah secara prosentase terhadap belanja daerah masih kecil, sehingga bila dilakukan perhitungan secara gabungan/simultan pengaruhnya belum mampu menggantikan peran belanja daerah.

Tabel 11. Uji F (Simultan)

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2991017291.646	3	997005763.882	124.700	.000 ^b
	Residual	863482828.631	108	7995211.376		
	Total	3854500120.277	111			

a. Dependent Variable: Belanja Daerah

b. Predictors: (Constant), Angsuran Pinjaman, Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

Dari data yang telah dilakukan pengujian baik menggunakan *Common Size Analysis* serta Uji asumsi klasik disimpulkan sebagai berikut:

Kesimpulan

1. Peranan Pinjaman daerah terhadap Belanja Daerah pada tahun 2015-2021 secara rata-rata semakin besar presentase setiap tahunnya yaitu untuk pinjaman terhadap pendapatan daerah sebesar 15,28% serta pinjaman terhadap belanja daerah sebesar 13,50%, hal ini dimungkinkan mengingat banyak Pemerintah Daerah berupaya keras untuk memajukan daerahnya dengan cara meningkatkan pembangunan di segala lini, namun belum diimbangi dengan penerimaan asli daerah (PAD) yang meliputi penerimaan pajak, retribusi, pendapatan lainnya yang sah. Pinjaman daerah harus dipergunakan secara efektif seperti dipergunakan untuk pembangunan yang akan memperoleh atau meningkatkan

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

Penerimaan Asli Daerah serta penambahan modal pada BUMD, maka jangka panjang berdampak pada kesulitan perencanaan belanja daerah, sebab banyak program pembangunan yang terkena imbasnya untuk di tunda, mengingat dana dipergunakan untuk memprioritaskan pemenuhan kewajiban pembayaran pokok dan bunga sebagai komitmen Pemerintah Daerah terhadap pihak ketiga, sebab bila tidak membayar tepat waktu bisa dinyatakan wanprestasi sehingga berdampak pada reputasi sebuah pemerintahan dalam mengemban amanah kepercayaan masyarakat.

2. Kewajiban membayar kembali angsuran pinjaman periode 2015-2021 secara rata-rata semakin besar presentase setiap tahunnya yaitu untuk angsuran pinjaman daerah terhadap pendapatan daerah sebesar 15,84% serta angsuran pinjaman daerah terhadap belanja daerah sebesar 14,01%. Dengan demikian banyak pemerintah daerah di Jawa Barat yang belum efisien dalam merencanakan Belanja Daerah pada periode tersebut, sebab setiap Rp 1,00 angsuran Pinjaman Daerah menyebabkan berkurangnya Belanja Daerah sebesar 14,01%. Sedangkan untuk menjaga Solvabilitas Pemerintah Daerah terus berupaya keras guna meningkatkan Pendapatan Daerah wajib mencapai sebesar 15,84%, sebab jika kurang dari rasio tersebut maka berdampak pada penundaan hutang atau menunda berbagai proyek strategisnya.
3. Beberapa Pemerintah Daerah di Jawa Barat pada periode 2015-2021 secara rata-rata angsuran pinjaman daerah terhadap pendapatan daerah melewati angka 1% yaitu Kabupaten Ciamis 1,37%, Kabupaten Purwakarta 1,48%, Kabupaten Sumedang 1,35%, Kabupaten Tasikmalaya 1,16%, Kabupaten Pengandaran 1,11% sedangkan rasionya diatas 1,5% yaitu Kota Cirebon 2,12%, Kota Bogor 1,54%. Rasio ini menggambarkan bahwa efisiensi dan efektivitas dalam penerimaan dan penggunaan Daerah belum optimal, sehingga banyak pengeluaran daerah yang tidak diseleraskan dengan penerimaannya.
4. Penilaian atas pengaruh pendapatan, pinjaman dan angsuran pinjaman daerah terhadap belanja daerah bila dinilai secara parsial maka pinjaman dan angsuran daerah pengaruhnya belum signifikan seperti pendapatan daerah terhadap belanja daerah, namun bila dinilai secara simultan bahwa pendapatan daerah, pinjaman dan angsuran pinjaman daerah memiliki pengaruh yang signifikan.

Saran

Beberapa rekomendasi guna mencapai efektif dan efisien pada belanja daerah untuk melaksanakan pembangunan:

1. Penggunaan pinjaman daerah dipergunakan harus efisien yaitu memprioritaskan pada pembangunan infrastruktur yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pembangunan Pasar Tradisional Modern, Terminal Bus Antar Kota Modern sehingga selain meningkatkan ekonomi kerakyatan akan mampu mendongkrak penerimaan daerah, juga pada

- penambahan Modal Saham kepada BUMD yang sehat seperti PT Bank Jabar Banten, yang mampu memberikan deviden pada tahun 2020-2021 sangat besar terhadap pemegang saham individual di Bursa Efek Indonesia (BEI) meskipun iklim usaha yang tidak bagus, serta kepedulian terhadap BUMD seperti PT Bank Jabar-Banten memberikan multiplier efek perekonomian mengingat seluruh hasil yang diperolehnya dikembalikan lagi ke daerah untuk mampu menggerakkan perekonomian daerah di Jawa Barat.
2. Efektif dalam peningkatan penerimaan daerah yaitu dengan melakukan intensifikasi serta ekstensifikasi baik subyek dan obyek pajak daerah melalui digitalisasi penerimaan, mengingat rasio angsuran pinjaman daerah rasionya telah mencapai diatas 1,5% pada dua kota yaitu Bogor dan Cirebon. Hal ini tentunya banyak dipengaruhi kondisi pandemi Covid-19 berdampak pada penerimaan omzet Hotel, Restoran, dan hiburan yang menurun, namun aktivitas perdagangan beralih pada sektor UMKM yang menggeliat dan telah menggunakan perdagangan secara eComerce. Pemanfaatan digitalisasi pada penerimaan asli daerah belum sepenuhnya dilakukan oleh beberapa daerah di Provinsi Jawa Barat seperti penggunaan ePHRI, e-Penggunaan BBM, e-Pajak Penerangan Jalan (PPJ) sehingga penerimaan belum optimal. Pemberian kewenangan desentralisasi fiskal ke pemerintah daerah sepenuhnya, sehingga melalui ekstensifikasi dan intensifikasi fiskal daerah mampu menuju kemandirian anggaran yang tidak menggantungkan Pemerintah Pusat melalui dana perimbangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, T., & Maulida, Z. (2011). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI UMUM TERHADAP KEMANDIRIAN DAERAH DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH. *Jurnal Akuntansi Dan Investasi*, 12(1), 1–12. <https://journal.umy.ac.id/index.php/ai/article/viewFile/673/828>
- Aji, B. P., Kirya, K., Agus, G. P., Susila, J., & Manajemen, J. (2015). ANALISIS SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DI KABUPATEN BULELENG. In *Journal Bisma Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Manajemen* (Vol. 3).
- Alajami, A. (2020). Beyond originality in scientific research: Considering relations among originality, novelty, and ecological thinking. *Thinking Skills and Creativity*, 38, 100723. <https://doi.org/10.1016/J.TSC.2020.100723>
- al-Rubaie, Q. L. A., & Ahmed, A. S. (2021). Measuring and analyzing the repercussions of public debt in financing the general budget deficit for the Iraqi economy after 2003 using the (Eviews) program. *Materials Today: Proceedings*. <https://doi.org/10.1016/J.MATPR.2021.07.180>
- Baskaran, T., Brender, A., Blesse, S., & Reingewertz, Y. (2016). Revenue decentralization, central oversight, and the political budget cycle: Evidence from Israel. *European Journal of Political Economy*, 42, 1–16. <https://doi.org/10.1016/J.EJPOLECO.2015.12.001>

Analisa Pengaruh Pinjaman Daerah, Pendapatan Daerah serta konsumsinya terhadap Kelangsungan Perencanaan Belanja Daerah

- Cao, C., Dong, Y., Hou, W., Liu, Y., & Qian, X. (2019). Provincial official turnover and bank loans. *Pacific-Basin Finance Journal*, 57, 101202. <https://doi.org/10.1016/J.PACFIN.2019.101202>
- Chen, Z., He, Z., & Liu, C. (2020). The financing of local government in China: Stimulus loan wanes and shadow banking waxes. *Journal of Financial Economics*, 137(1), 42–71. <https://doi.org/10.1016/J.JFINECO.2019.07.009>
- Corporate Finance Institute. (2022). Common Size Analysis - Overview, Examples, How to Perform. *Common Size Analysis*, 1–8. <https://corporatefinanceinstitute.com/resources/knowledge/finance/common-size-analysis/>
- Farida, I., Suharti, T., Diah, D., Manager, Y. J., & Yudhawati, D. (2019). ANALISIS METODE COMMON SIZE UNTUK MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN. 2(2), 56–68. <http://ejournal.uikabogor.ac.id/index.php/Manager/index>
- Imam Ghozali, M. (2006). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. https://openlibrary.org/publishers/Badan_Penerbit_Universitas_Diponegoro
- Kemenkeu RI. (2011). Pinjaman Daerah. *Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan*, 1–1. https://djpk.kemenkeu.go.id/?page_id=328
- Kemenkeu RI. (2020). Pinjaman ke Daerah, Salah Satu Upaya Pemerintah Dukung Pemulihan Ekonomi Nasional. *Berita Kemenkeu RI*, 1–1. <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/pinjaman-ke-daerah-salah-satu-upaya-pemerintah-dukung-pemulihan-ekonomi-nasional/>
- Mahdavi, S., & Westerlund, J. (2018). Subnational government tax revenue capacity and effort convergence: New evidence from sequential unit root tests. *Economic Modelling*, 73, 174–183. <https://doi.org/10.1016/J.ECONMOD.2018.03.016>
- Malware, M. (2017). Analisis Statistik Deskriptif Nilai UAS Ekonomitrika Mahasiswa dengan Program SPSS 23 & Eviews 8.1. *Jurnal Pendidikan Islam Indonesia*, 1(2), 273–292. <https://doi.org/10.35316/jpii.v1i2.54>
- Nasir, M. (2019). ANALISIS SUMBER-SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH SETELAH SATU DEKADE OTONOMI DAERAH. *JDEP*, 2(1), 30–45. https://ejournal.undip.ac.id/index.php/dinamika_pembangunan/index
- Nurul, H. (2020, January). Peran Pinjaman dan Obligasi Daerah terhadap Pembangunan. *Kompasiana.Com*, 1–1. <https://www.kompasiana.com/hudakuy0775/5eb434d7d541df47df6b47a4/peran-pinjaman-dan-obligasi-daerah-terhadap-pembangunan>
- Pratiwi, R. N., & Hidayati, C. (2018). ANALISA RASIO KEUANGAN DAN COMMON SIZE DALAM MENGUKUR KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF DAN KOMPONEN TAHUN 2009-2013 (YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA). *Ekonomi Akuntansi*, 3(2), 1–13. <https://core.ac.uk/download/pdf/287221039.pdf>
- Räsänen, J., & Mäkelä, E. (2021). The effect of government spending on local economies during an economic downturn. *European Economic Review*, 134, 103697. <https://doi.org/10.1016/J.EUROECOREV.2021.103697>
- Sari, N. M. D. P., & Mustanda, I. K. (2019). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 8(8), 4759. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2019.v08.i08.p02>

- Sipos, A. (2015). Determining Factors of Tax-morale with Special Emphasis on the Tax Revenues of Local Self-governments. *Procedia Economics and Finance*, 30, 758–767. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)01325-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)01325-8)
- Sudarmana, I. P. A., & Sudiartha, G. M. (2020). PENGARUH RETRIBUSI DAERAH DAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI DINAS PENDAPATAN DAERAH. *E-Jurnal Manajemen Universitas Udayana*, 9(4), 1338. <https://doi.org/10.24843/ejmunud.2020.v09.i04.p06>
- Sugiyono, P. D. (2013). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF KUALITATIF DAN R & D* (P. D. Sugiyono, Ed.; 19th ed.). Alfabeta, CV.
- Yaqin, U. A., & Herwanti, T. (2018). ANALISIS PERMASALAHAN PENGELOLAAN DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS PADA PEMERINTAH DAERAH. In *Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan* (Vol. 1, Issue 2).
- Yuliasati K. (2017). *URGENSI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH (APBD) TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH*. 5(4), 1–12. <https://media.neliti.com/media/publications/212467-urgensi-anggaran-pendapatan-belanja-daer.pdf>